



PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025



LKJIP DPUPR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Jl. Kusuma Bangsa No.45 Pekalongan 51149 Telp.(0285) 423222 Fax.(0285) 421239



dpuprpekalongankota@gmail.com

dpupr.pekalongankota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga (Nama Perangkat Daerah) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pekalongan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 24 Februari 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKALONGAN



AGAR UDIN, S.T.

Pembina TK 1
NIP. 19761206 200502 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dalam mencapai tujuan organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dengan total 7 (tujuh) indikator kinerja dan 7 (tujuh) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025. Selanjutnya hasil analisis terhadap 7 (tujuh) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 84.55.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP DPUPR 83.05 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 98.23%.

2. Indikator Sasaran Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi 96.38% maka tingkat ketercapaiannya adalah 96.38%
3. Indikator Sasaran Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir target yang ditetapkan adalah 82.98% dengan realisasi 93.93% maka tingkat ketercapaiannya adalah 113.20%
4. Indikator Sasaran Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi 100% maka tingkat ketercapaiannya adalah 100%
5. Indikator Sasaran Pengembangan Sarana Persampahan target yang ditetapkan adalah 80% dengan realisasi 120% maka tingkat ketercapaiannya adalah 150%
6. Indikator Sasaran Persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan target yang ditetapkan adalah 1.09 % dengan realisasi -6.44%.
7. Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target yang ditetapkan adalah 99.89% dengan realisasi 99.89% maka tingkat ketercapaiannya adalah 100%.

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp realisasi anggaran sebesar Rp48.254.711.496,00-. atau 91.63% dari total pagu anggaran sebesar Rp Rp52.663.922.000,00-. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu :

1. Kondisi geografis Kota Pekalongan yang terletak di pesisir pantai utara Jawa Tengah dengan luas wilayah 4642 Ha dengan jumlah penduduk 316.276 Jiwa mengakibatkan keterbatasan lahan atau lokus untuk pengembangan infrastruktur khususnya infrastruktur yang mendukung Sanitasi dan Persampahan;
2. Tingginya penurunan air muka tanah (*landsubsidence*) yang

- mengakibatkan perluasan genangan banjir dan rob;
3. Kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh data dukung dari pihak eksternal maupun internal;
 4. Adanya penurunan dana transfer kedaerah dari Pusat yang berdampak pada penurunan belanja Infrastruktur.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas DPUPR Kota Pekalongan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terbangunnya beberapa TPS3R di sebagian wilayah Kota Pekalongan, peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan persampahan;
2. Telah terbangunnya tanggul raksasa dan beberapa stasiun pompa pengendali banjir yang ada di daerah Kota Pekalongan baik skala wailayan maupun lingkungan;
3. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan terkait kebijakan SAKIP serta koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang didukung oleh personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah;
4. Pengusulan bantuan keuangan ke Pemerintah Pusat atau Provinsi sebagai mekanisme transfer anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Pekalongan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | I |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | II |
| DAFTAR ISI | V |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI | 2 |
| 1.3 KONDISI APARATUR | 5 |
| 1.4 SARANA DAN PRASARANA | 6 |
| 1.5 ISU STRATEGIS | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026 | 9 |
| 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026 ... | 15 |
| 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 22 |
| 3.1 PENGUKURAN KINERJA | 22 |
| 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 25 |
| 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN | 54 |
| BAB IV PENUTUP | 62 |
| LAMPIRAN | |
| Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026 | |
| Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan No. 79 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bagian kedua Tugas dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sumber daya air;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang bina marga;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang cipta karya;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata ruang dan bangunan;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- h. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- i. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

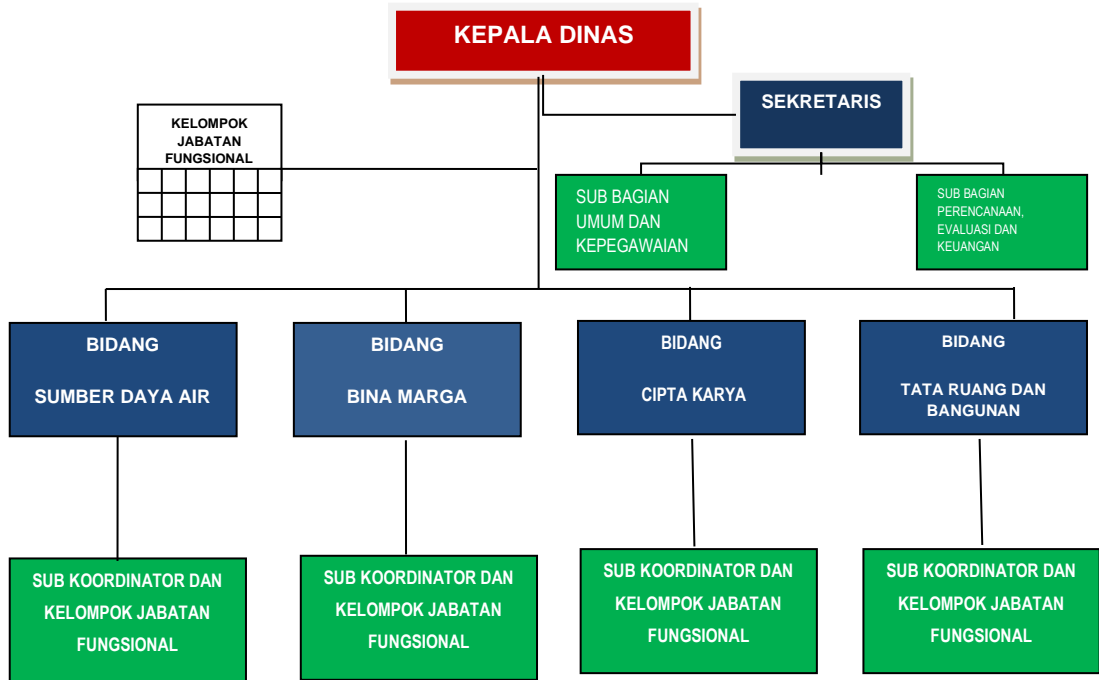
Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ditetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sekretaris
 - b. Subbagian Renval dan Keuangan
 - c. Subbagian Umum & Kepegawaian

- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari
 - 1. Kepala Bidang Bina Marga
 - 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari
 - 1. Kepala Bidang SDA
 - 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Tata Ruang dan Bangunan
 - 1. Kabid Tata Ruang dan Bangunan
 - 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Cipta Karya
 - 1. Kabid Cipta Karya
 - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1. Jabatan Fungsional Teknik Tata bangunan dan Perumahan
 - 2. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan
 - 3. Jabatan Fungsional Penata Ruang

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar pada halaman berikut:



1.3 KONDISI APARATUR

Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 mempunyai pegawai sebanyak 175 orang, terdiri dari 149 orang laki-laki dan 26 orang perempuan, serta didukung dengan tenaga Non ASN sebanyak 29 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

| NO | BIDANG | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | GENDER | | TOTAL (ORANG) |
|----|-----------------|--------------------|------|------|----|-----|-----|--------|---|---------------|
| | | SD | SLTP | SLTA | D3 | S-1 | S-2 | L | P | |
| 1 | SEKRETARIAT | | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 19 | 7 | 26 |
| 2 | BINA MARGA | | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 15 | 3 | 18 |
| 3 | SUMBER DAYA AIR | 13 | 17 | 63 | 2 | 10 | 0 | 102 | 3 | 105 |
| 4 | CIPTA KARYA | | | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|---|----|---|---|---|----|
| 5 | TATARUANG DAN BANGUNAN | | | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 8 | 13 |
|---|------------------------|--|--|---|---|----|---|---|---|----|

Sumber DPUPR Kota Pekalongan, Desember 2025

Tabel 1.3.2

Jumlah Pegawai DPUPR Berdasarkan Pangkat/Golongan

| NO | BIDANG | GOLONGAN (ORANG) | | | | | TOTAL (ORANG) |
|----|------------------------|------------------|-----|----|------|---------|---------------|
| | | II | III | IV | PPPK | NON ASN | |
| 1 | SEKRETARIAT | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 26 |
| 2 | BINA MARGA | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| 3 | SUMBER DAYA AIR | 7 | 9 | 0 | 65 | 24 | 105 |
| 4 | CIPTA KARYA | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 |
| 5 | TATARUANG DAN BANGUNAN | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 |

Sumber DPUPR Kota Pekalongan, Desember 2025

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan didukung dengan prasarana yang memadai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 mempunyai beberapa sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pegawai dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.4.1

Prasarana dan Sarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan |
|-----|---|--------|--------|
| 1 | Gedung Kantor | 1 | unit |
| 2. | Gedung Workshop Bina Marga | 1 | unit |
| 3. | Wheel Excavator | 1 | unit |
| 4. | Crawler Excavator + Attachment | 2 | unit |
| 5. | Dump Truck | 1 | unit |
| 6. | Asphalt Mixing Plant | 1 | unit |
| 7. | Macadam Roller / Three Wheel Roller (2 ½ - 4 ton) | 2 | unit |
| 8. | Macadam Roller / Three Wheel Roller (6-8 ton) | 4 | unit |
| 9. | Vibrator Roller | 3 | unit |
| 10 | Stamper | 1 | unit |
| 11. | Concrete Mixer | 4 | unit |
| 12. | Concrete Breaker | 1 | unit |
| 13. | Loader Lain-lain | 1 | unit |
| 14. | Truck Crane | 1 | unit |
| 15. | Portable Compressor | 1 | unit |
| 16. | Transportable Water Pump | 7 | unit |
| 17. | Portable Water Pump | 229 | unit |
| 18. | Stationary Water Pump | 47 | unit |

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan |
|-----|---|--------|--------|
| 19. | Sumersible Pump | 38 | unit |
| 20. | Pompa Air | 13 | unit |
| 21. | Jack | 1 | unit |
| 22. | Station Wagon | 3 | unit |
| 23. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 2 | unit |
| 24. | Pick Up | 4 | unit |
| 25. | Sepeda Motor | 23 | unit |
| 26. | Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain | 4 | unit |
| 27. | Mobil Tinja | 1 | unit |
| 28. | Truck Sampah | 1 | unit |
| 29. | Gerobak Dorong | 5 | unit |
| 30. | Angkutan Barang Lain-lain | 2 | unit |
| 31. | Mesin Gerinda | 2 | unit |
| 32. | Mesin Kompresor | 1 | unit |
| 33. | Mesin Las Listrik | 1 | unit |
| 34. | Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi) | 3 | unit |
| 35. | Overhead Crane | 6 | unit |
| 36. | Mesin Penghitung Uang | 1 | unit |
| 37. | Lemari Besi/Metal | 8 | unit |
| 38. | Lemari Kayu | 22 | unit |
| 39. | Rak Besi | 17 | unit |
| 40. | Filing Cabinet Besi | 38 | unit |
| 41. | Brandkas | 2 | unit |
| 42. | Lemari Kaca | 1 | unit |
| 43. | White Board | 4 | unit |
| 44. | Alat Penghancur Kertas | 7 | unit |
| 45. | Mesin Absensi | 7 | unit |
| 46. | Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) | 2 | unit |
| 47. | Meja Rapat | 20 | unit |
| 48. | Kursi Rapat | 149 | unit |
| 49. | Kursi Tamu | 2 | unit |
| 50. | Kursi Putar | 38 | unit |
| 51. | Kursi Lipat | 21 | unit |
| 52. | Lemari Pakaian | 1 | unit |
| 53. | Meja Tulis | 4 | unit |
| 54. | Mesin Pemetong Rumput | 16 | unit |
| 55. | Lemari Es | 5 | unit |
| 56. | A.C. Window | 22 | unit |
| 57. | A.C. Split | 8 | unit |
| 58. | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 1 | unit |
| 59. | Treng Air/Tandon Air | 2 | unit |
| 60. | Televisi | 10 | unit |
| 61. | Sound System | 16 | unit |
| 62. | Unit Power Supply | 1 | unit |
| 63. | Camera Video | 6 | unit |
| 64. | Camera film | 1 | unit |
| 65. | Tiang Bendera | 1 | unit |
| 66. | Tangga Aluminium | 6 | unit |

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|
| 67. | Dispenser | 2 | unit |
| 68. | Handy Cam | 5 | unit |
| 69. | Gordyin/Kray | 8 | unit |
| 70. | Universal Testing Machine (Alat) | 42 | unit |
| 71. | P.C Unit | 16 | unit |
| 72. | Lap Top | 37 | unit |
| 73. | Note Book | 5 | unit |
| 74. | Hard Disk | 5 | unit |
| 75. | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 | unit |
| 76. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 22 | unit |
| 77. | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1 | unit |

Sumber DPUPR Kota Pekalongan, Desember 2025

1.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan
2. Pemenuhan ketersediaan sarana pengendali rob dan banjir
3. Optimalisasi kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/*deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan .

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan
Tahun 2025

| Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan | Indikator | Target 2025 |
|--|-----------|-------------|
| VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan | | |

| Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan | Indikator | Target 2025 |
|---|---|-------------|
| yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius | | |
| Misi Ke- 2 dan Ke-4 | | |
| Tujuan Kota : | | |
| Tujuan DPUPR 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78.62 |
| Sasaran DPUPR 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | 84.55 |
| Program DPUPR 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100 |
| | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 |
| | Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah | 100 |
| Kegiatan DPUPR 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 |
| Kegiatan DPUPR 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah | 100 |
| Kegiatan DPUPR 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 |
| Kegiatan DPUPR 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 |
| Kegiatan DPUPR 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah | 100 |
| Kegiatan DPUPR 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Persentase ketercapaian | 100 |

| Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan | Indikator | Target 2025 |
|---|---|-------------|
| Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| Kegiatan DPUPR 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 |
| Kegiatan DPUPR 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 |
| Tujuan DPUPR 2 : Pemenuhan Layanan Limbah Domestik | Persentase layanan pengolahan air limbah domestik | 91.40 |
| Sasaran DPUPR 2 : Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | 100 |
| Program DPUPR 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) | 17.23 |
| Kegiatan DPUPR 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output) | 59951 |
| Tujuan DPUPR 3 : Penanganan banjir dan rob | Luas Genangan Banjir dan Rob | 790 |
| Sasaran DPUPR 3 : Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | 82.98 |
| Program DPUPR 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda) | Persentase sarpras pengendali banjir dan | 100 |

| Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan | Indikator | Target 2025 |
|---|---|-------------|
| | rob dalam kondisi baik | |
| Kegiatan DPUPR 1: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik | 27 |
| Kegiatan DPUPR 2 : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output) | 84.21 |
| Kegiatan DPUPR 3 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik | 174,642.18 |
| Tujuan DPUPR 4 : Meningkatkan layanan air minum | Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum | 82.98 |
| Sasaran DPUPR 4 : Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | 100 |
| Program DPUPR 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah | 90.90 |
| Kegiatan DPUPR 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan | 100 |
| Tujuan DPUPR 5 : Optimalisasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Persampahan Perkotaan | Persentase prasarana persampahan dalam kondisi baik | 61.11 |
| Sasaran DPUPR 5 : Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan Sarana Persampahan | 80 |
| Program DPUPR 1 : Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional | 80 |
| Kegiatan DPUPR 1 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota | 80 |
| Tujuan DPUPR 6 : Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan | Persentase keterhubungan jalan | 96.73 |

| Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan | Indikator | Target 2025 |
|--|--|-------------|
| Sasaran DPUPR 6 : Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan | 1.09 |
| Program DPUPR 1 : Program Penyelenggaraan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) | 79.02 |
| Kegiatan DPUPR 1 : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang | 118.75 |
| Tujuan DPUPR 7 : Mewujudkan Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang | Jumlah regulasi bidang perencanaan tata ruan--g dan pemanfaatan ruang | 7 |
| Sasaran DPUPR 7 : Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 99.89 |
| Program DPUPR 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota | 100.00 |
| Program DPUPR 2 : Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi | 18.53 |
| Kegiatan DPUPR 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan | 12 |
| Kegiatan DPUPR 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan | 12 |
| Kegiatan DPUPR 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan | 12 |
| Kegiatan DPUPR 4 : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota | 1 |
| Kegiatan DPUPR 5 : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia | 100 |

| Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan | Indikator | Target 2025 |
|---|---|-------------|
| Kegiatan DPUPR 6 : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output) | 330 |

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

| No. | Sasaran Strategis | IKU | Satuan | Formulasi | Sumber Data |
|-----|--|--|--------|---|--------------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip OPD | Indeks | Nilai SAKIP Tahun N | Sekretariat |
| 2 | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah | Persen | (Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di | Bidang Cipta Karya |

| | | | | | |
|---|---|---|--------|---|--------------------------------|
| | | domestik (IKK Outcome) | | IPALD) / jumlah rumah kab/kota * 100% | |
| 3 | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase luas Kawasan kota rawan banjir dan rob yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir | Persen | Luas Kawasan Kota yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir / Luas Wilayah Kota * 100% | Bidang Sumber Daya Air |
| 4 | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | Persen | Jumlah jiwa yang terlayani air minum perkotaan (domestik + non domestik) dibagi jumlah penduduk | Bidang Cipta Karya |
| 5 | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan sarana persampahan | Persen | Jumlah komponen yang ditingkatkan menjadi kondisi baik sampai dengan tahun N/target penanganan sampai dengan tahun akhir RPJMD | Bidang Cipta Karya |
| 6 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan | Persen | (Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap pada Tahun N - Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1) / Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1 *100% | Bidang Bina Marga |
| 7 | Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Persen | Luas kawasan lindung dan budidaya yang sesuai dengan perda RTRW tahun N / Luas kawasan lindung dan budidaya sesuai perda RTRW * 100% | Bidang Tata Ruang dan Bangunan |

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sebagaimana

telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Target Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekalongan
Tahun 2021-2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 82.50 | 83.50 | 84.50 | 84.45 | 84.55 | 84.65 |
| 2 | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | Persen | 98.40 | 98.60 | 98.80 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | Persen | 66,89 | 73,50 | 77,88 | 80.42 | 82.98 | 87.83 |
| 4 | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | Persen | 85,766 | 87,092 | 88,389 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan Sarana Persampahan | Persen | N/A | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 6 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan | Persen | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 2.19 | 1,09 | 1,09 |
| 7 | Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan | Persen | 96.187 | 96.203 | 96.211 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KETERANGAN |
|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| Tujuan : | | | | |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | Indeks kepuasan masyarakat | 78.62 Indeks | Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi |
| 2. | Pemenuhan Layanan Limbah Domestik | Persentase layanan pengolahan air limbah domestik | 91.40 Persen | Formulasi : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik |

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KETERANGAN |
|------------------|---|---|---------------|--|
| | | | | Sumber data : DPUPR |
| 3. | Penanganan banjir dan rob | Luas Genangan Banjir dan Rob | 790.00 hektar | Formulasi : Luas genangan banjir dan rob Tipe capaian : Semakin Rendah Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 4. | Meningkatkan layanan air minum | Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum | 100.00 Persen | Formulasi : Jumlah jiwa yang memperoleh akses air minum baik dari pemerintah ataupun mandiri dibagi jumlah penduduk * 100 % Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 5. | Optimalisasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Persampahan Perkotaan | Persentase prasarana persampahan dalam kondisi baik | 61.11 Persen | Formulasi : Jumlah penambahan komponen prasarana persampahan kondisi baik Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 6. | Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan | Persentase keterhubungan jalan | 96.73 Persen | Formulasi : Total panjang jalan sekota dibandingkan dengan total panjang jalan yang belum terbangun Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 7. | Mewujudkan Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang | Jumlah regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | 7.00 Regulasi | Formulasi : Akumulasi dengan Tahun sebelumnya Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| Sasaran : | | | | |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP OPD | 84.55 Indeks | Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi |

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KETERANGAN |
|----|---|---|--------------|--|
| | perangkat daerah | | | Semakin Baik Sumber data : Inspektorat |
| 2. | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | 100 Persen | Formulasi : (Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / jumlah rumah kab/kota * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 3. | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | 82.98 Persen | Formulasi : Luas Kawasan Kota yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir / Luas Wilayah Kota * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 4. | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | 100 Persen | Formulasi : Jumlah jiwa yang terlayani air minum perkotaan (domestik + non domestik) dibagi jumlah penduduk Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 5. | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan Sarana Persampahan | 80.00 Persen | Formulasi : Jumlah komponen yang ditingkatkan menjadi kondisi baik sampai dengan tahun N/target penanganan sampai dengan tahun akhir RPJMD Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 6. | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan | 1.09 Persen | Formulasi : (Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap pada Tahun N - Panjang Jala Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1) / Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1 *100% Tipe capaian : Semakin Tinggi |

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KETERANGAN |
|----|--|--|--------------|---|
| | | | | Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 7. | Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 99.89 Persen | Formulasi : Luas kawasan lindung dan budidaya yang sesuai dengan perda RTRW tahun N / Luas kawasan lindung dan budidaya sesuai perda RTRW * 100%Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |

| Program | Anggaran Penetapan (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) | Keterangan |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota Daerah | 13.562.969.000 | 13.452.802.000 | APBD |
| 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 8.441.918.000 | 8.633.678.000 | APBD |
| 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 2.608.052.000 | 1.414.658.000 | APBD |
| 4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | 2.411.000.000 | 3.841.008.000 | APBD |
| 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 2.173.514.000 | 2.417.064.000 | APBD |
| 6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 4.402.600.000 | 3.930.895.000 | APBD |
| 7. Program Penataan Bangunan Gedung | 1.775.544.000 | 1.875.369.000 | APBD |
| 8. Program Penyelenggaraan Jalan | 18.747.730.000 | 16.542.644.000 | APBD |
| 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 108.640.000 | 112.300.000 | APBD |
| 10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 301.404.000 | 293.004.000 | APBD |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi

kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

| Skala Ordinal | Predikat / Kategori |
|----------------------|---------------------------------------|
| 90.1 s.d. lebih | Sangat Tinggi / Sangat Berhasil |
| 75.1 s.d. 90 | Tinggi / Berhasil |
| 65.1 s.d. 75 | Sedang / Cukup Berhasil |
| 50.1 s.d. 65 | Rendah / Tidak Berhasil |
| 0 s.d. 50 | Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil |

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
|----|--|---|--------|--------|-----------|-------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 84.55 | 83.05 | 98.23 | Sangat berhasil |
| 2 | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | Persen | 100 | 96.38 | 96.38 | Sangat berhasil |
| 3 | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | Persen | 82.98 | 93.93 | 113.20 | Sangat berhasil |
| 4 | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil |
| 5 | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan Sarana Persampahan | Persen | 80 | 120 | 150 | Sangat Berhasil |
| 6 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan | Persen | 1,09 | -6.44 | 0 | Sangat Tidak Berhasil |
| 7 | Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persen | 99.89 | 99.89 | 100 | Sangat Berhasil |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **93,97% dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil**

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Capaian Kinerja | | | | Ket |
|----|--|---|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 84.10 | 84.45 | 81.25 | 83.05 | ▲ |
| 2 | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | Persen | 99.69 | 100 | 100 | 96.38 | ▼ |
| 3 | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | Persen | 33.93 | 77.88 | 91.83 | 93.93 | ▲ |
| 4 | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | Persen | 86.07 | 100 | 100 | 100 | ● |
| 5 | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan Sarana Persampahan | Persen | 0 | 20 | 60 | 120 | ▲ |
| 6 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan | Persen | 4.73 | 2.19 | 2.85 | -6.44 | ▼ |
| 7 | Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persen | 99.95 | 99.98 | 99.45 | 99.89 | ▲ |

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap perbandingan capaian indikator kinerja Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas yaitu nilai SAKIP OPD, dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 selalu mengalami kenaikan namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan dan pada Tahun 2025

- mengalami kenaikan;
2. Indikator sasaran Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan namun pada Tahun 2025 mengalami penurunan;
 3. Indikator sasaran Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 selalu mengalami kenaikan;
 4. Indikator sasaran persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 selalu tetap karena capaian sudah 100%;
 5. Indikator Pengembangan Sarana Persampahan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 mulai mengalami peningkatan;
 6. Indikator Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan pada Tahun 2022 dan Tahun 2025 mengalami penurunan capaian;
 7. indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 mengalami peningkatan capaian.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi s/d 2025 | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian (%) | Kategori |
|----|---|---|--------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 83.05 | 84.65 | 98.10 | Sangat Berhasil |
| 2 | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | Persen | 96.38 | 100 | 96.38 | Sangat Berhasil |
| 3 | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | Persen | 93.93 | 87.83 | 106.94 | Sangat Berhasil |
| 4 | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi s/d 2025 | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian (%) | Kategori |
|----|--|--|--------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 5 | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan Sarana Persampahan | Persen | 120 | 100 | 120 | Sangat Berhasil |
| 6 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan | Persen | -6.44 | 1,09 | 0 | Sangat Tidak Berhasil |
| 7 | Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persen | 99.89 | 99.89 | 100 | belum berhasil |

Realisasi capaian kinerja utama Sasaran DPUPR Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RENSTRA antara lain sebagai berikut :

1. Indikator sasaran nilai SAKIP OPD capainnya 98.10% dengan kategori sangat berhasil;
2. Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik capaiannya 96.38% dengan kategori sangat berhasil;
3. indikator Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir capainnya 106.94% dengan kategori sangat berhasil;
4. indikator air minum terhadap jumlah penduduk capaiannya 100% dengan kategori sangat berhasil;
5. Pengembangan Sarana Persampahan capaiannya 120% dengan kategori sangat berhasil;
6. indikator Persentase peningkatan kemantapan jalan capaiannya 0% dengan kategori sangat tidak berhasil;
7. indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang capaiannya 100% dengan kategori sangat berhasil.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi s/d 2025 | Target Provinsi | Capaian (%) | Kategori |
|----|--|---|--------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 83.05 | 91.00 | 70.75 | Sangat Baik |
| 2 | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | Persen | 96.38 | 10.97 | 9.72 | Sangat Berhasil |
| 3 | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | Persen | 93.93 | - | - | |
| 4 | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | Persen | 100 | 40,43 | 40,86 | Sangat Berhasil |
| 5 | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan Sarana Persampahan | Persen | 120 | - | - | |
| 6 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan | Persen | -6.44 | 44.48 | 47.09 | Sangat Berhasil |
| 7 | Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persen | 99.89 | - | - | |

Realisasi capaian Indikator kinerja Sasaran Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir, Indikator sasaran Pengembangan Sarana Persampahan dan indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator Sasaran tersebut tidak dapat dibandingkan karena merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

3.2.2. Capaian Indikator Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

| No | Tujuan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 78.62 | 90.08 | 114.58 | Sangat berhasil |
| 2 | Pemenuhan Layanan Limbah Domestik | Persentase layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 91.40 | 89.89 | 98.34 | Sangat berhasil |
| 3 | Penanganan Banjir Dan Rob | Luas Genangan Banjir dan Rob | Persen | 790.00 | 281.69 | 280.45 | Sangat berhasil |
| 4 | Meningkatkan Layanan Air Minum | Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum | Persen | 82.98 | 100.00 | 120.51 | Sangat Berhasil |
| 5 | Optimalisasi Pelayanan Sarana Dan Prasarana Persampahan Perkotaan | Persentase prasarana persampahan dalam kondisi baik | Persen | 61.11 | 78.16 | 127.90 | Sangat Berhasil |
| 6 | Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan | Persentase keterhubungan jalan | Persen | 96.73 | 100.00 | 103.38 | Sangat Tidak Berhasil |
| 7 | Mewujudkan Rumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang | Jumlah regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persen | 7.00 | 6.00 | 85.71 | Berhasil |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 5 target;
2. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target;
3. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 132,69% dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Target Akhir Renstra 2026 |
|----|-------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1 | Nilai SAKIP OPD | 91.09 | Indeks | 84.45 | 81.25 | 84.55 | 83.05 | 98.23 | 84.65 |

Indikator Sasaran Nilai SAKIP OPD Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan memperoleh nilai A atau predikat "Memuaskan". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025

| No | Daerah | Bobot | Nilai |
|----|------------------------|-------|-------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 24.90 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 24.00 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 12.90 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas | 25 | 21.25 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 83.05 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | A (Memuaskan) | |

Tabel 3.9 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

| NO | PERANGKAT DAERAH | NILAI TAHUN 2025 |
|----|----------------------------|------------------|
| | PROVINSI JAWA TENGAH | |
| | PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN | 73,28 |
| 1 | BAPPERIDA | 88,70 |
| 2 | DLH | 85,95 |
| 3 | DINDAGKOP UKM | 85,75 |
| 4 | INSPEKTORAT DAERAH | 84,75 |
| 5 | BPKAD | 84,60 |
| 6 | BKPSDM | 84,00 |
| 7 | DPMPPA | 83,55 |
| 8 | KOMINFO | 83,50 |
| 9 | DKP | 83,27 |
| 10 | DINKES | 83,25 |
| 11 | DPUPR | 83,05 |
| 12 | DINDUKCAPIL | 82,95 |
| 13 | SETDA | 81,85 |
| 14 | DINDIK | 78,50 |
| 15 | DINPARBUDPORA | 78,15 |
| 16 | DPMPTSP | 78,00 |
| 17 | KECAMATAN SELATAN | 77,15 |
| 18 | DINHUB | 77,00 |
| 19 | KECAMATAN UTARA | 76,65 |
| 20 | KECAMATAN BARAT | 76,50 |
| 21 | KECAMATAN TIMUR | 76,45 |
| 22 | DINPERPA | 76,40 |
| 23 | DINSOS P2KB | 76,35 |
| 24 | DINARPUS | 76,10 |
| 25 | BPBD | 76,00 |
| 26 | SATPOL P3KP | 75,50 |
| 27 | DINPERINAHER | 75,45 |
| 28 | DSET DPRD | 75,00 |
| 29 | DINPERKIM | 74,80 |
| 30 | BAKESBANGPOL | 73,75 |

Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja Indikator sasaran Nilai SAKIP OPD disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Targer terlalu tinggi, sudah mengajukan revisi target namun tidak disetujui;
- b. Masih ada data pendukung capaian kinerja yang kurang lengkap dan kurang sesuai sehingga beberapa capaian kinerja belum memenuhi target;
- c. Kurangnya Koordinasi antar bidang;
- d. Kurangnya dukungan inovasi dan minimnya penghargaan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator sasaran Nilai SAKIP OPD berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian target disesuaikan dengan kemampuan OPD;
- b. Melakukan review atas capaian kinerja yang belum memenuhi target;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan bidang terkait;
- d. Akan dilakukan pengembangan inovasi semua bidang yang mendukung kinerja dan pelayanan publik.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Percanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19,680,000 | 19,035,000 | 18,843,000 | Kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, dokumen RKA-SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang menjadi komponen dalam evaluasi AKIP Perangkat Daerah |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6,725,548,000 | 6,688,891,000 | 6,075,314,745 | Kegiatan administrasi keuangan, diperoleh laporan keuangan dan dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebagai akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 25,110,000 | 23,610,000 | 23,360,570 | Kegiatan administrasi barang ini diperoleh dari rekonsiliasi dan pengadministrasian BMD yang bertujuan sebagai sarana pembahasan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah |
| Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 13,410,000 | 13,410,000 | 12,662,000 | Kegiatan administrasi kepegawaian memiliki peran krusial dalam mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), karena administrasi kepegawaian memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang ada dikelola secara strategis untuk mencapai |

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | target kinerja, bukan sekadar urusan tata usaha. SAKIP menuntut pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government), sehingga administrasi kepegawaian bertugas memastikan kinerja pegawai sejalan dengan sasaran strategis instansi. |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 481,676,000 | 531,765,000 | 519,731,829 | Salah satu aktivitas dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebagai sarana pembahasan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 758,900,000 | 758,900,000 | 711,771,180 | Kegiatan pengadaan BMD berfungsi sebagai pendukung infrastruktur fisik (enabler) dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) dan dokumen perencanaan (Renstra). |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4,829,307,000 | 4,704,203,000 | 3,475,445,640 | Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran mendukung kelancaran pekerjaan |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kepala Daerah | 709,338,000 | 707,988,000 | 526,481,201 | Kegiatan pemeliharaan BMD berfungsi sebagai pendukung infrastruktur fisik (enabler) dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) dan dokumen perencanaan (Renstra). |
| Total | 13,562,969,000 | 13,447,802,000 | 11,363,610,165 | |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|---|--|--|---|
| Percanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 19,035,000 - Realisasi 18,843,000 (98,99%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,1% yang berasal dari : - Dari total anggaran menunjukkan adanya perencanaan dan penganggaran kinerja yang baik sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penggaran yang ada. | Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja. | Efisiensi waktu dalam proses perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan. |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp. 6.954.756.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 6.175.035.106, (88,78%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 11,21% berarti | Efisiensi SDM yang ada yaitu karena purna tugas dan adanya perpindahan berkaitan dengan mutasi, namun kinerja pelayanan publik dan kinerja | Efisiensi waktu dalam proses administrasi keuangan perangkat daerah yaitu dengan penyelesaian proses administrasi keuangan yang menggunakan |

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|--|--|--|--|
| | adanya efisiensi karena adanya SDM yang purna tugas dan perpindahan berupa mutasi kekosongan kepala Dinas Definitif. | perangkat daerah masih dapat terlaksana dengan baik. | SIPD, dan pola komunikasi penyelesaian kendala/permasalahan dilakukan melalui media chat online WAG, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kendala/permasalahan. |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp. 23,610,000,- - Realisasi Anggaran Rp. 23,360,570,- (98,94%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,06% yang berasal dari sisa realisasi anggaran | Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan dilakukannya reviu internal antar bidang sehingga memudahkan dalam mengerjakan rekon Aset di tingkat Kota. | Efisiensi waktu dalam proses administrasi barang milik daerah akan lebih optimal karena telah dilakukan desk/ reviu internal sebelum desk di tingkat Kota. |
| Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp. 13,410,000,- - Realisasi Anggaran Rp. 12,662,000,- (94,42%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 5,58% yang berasal dari sisa realiasi anggaran | Dengan adanya sosialisasi yang efektif akan mengurangi kebingungan atau kesalahan | Dengan adanya sosialisasi yang efektif pemahaman akan tujuan, prosedur dan aturan menjadi lebih cepat dan merata. |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp. 531,765,000,- - Realisasi Anggaran Rp. 519,731,829,- (97,74%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 2,26% yang berasal dari sisa realisasi anggaran | Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Dukungan penerapan sistem administrasi dan tata naskah dinas memungkinkan kegiatan berjalan efektif dan efisien | Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp. 758,900,000,- - Realisasi Anggaran Rp. 711,771,180,- (93,79%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 6,21% yang berasal dari sisa realisasi anggaran | Pengadaan barang melalui e-katalog sehingga tidak membutuhkan SDM yang terlalu banyak. | Waktu pelaksanaan lebih cepat dengan menggunakan apliaksi LPSE |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp. 4,704,203,000,- - Realisasi Anggaran Rp. 3,475,445,640,- (73,88%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 26,12% yang berasal dari penggunaan listrik, air, dan telepon. Efisiensi terjadi karena penggunaan dilakukan secara lebih tertib, terukur, dan sesuai kebutuhan riil perangkat daerah. | Peningkatan kedisiplinan pegawai dalam penggunaan fasilitas kantor, termasuk penghematan listrik, air, dan sarana komunikasi, sehingga tidak diperlukan tambahan tenaga dalam pengelolaan operasional rutin. | Optimalisasi komunikasi digital untuk mengurangi pengiriman fisik dokumen serta percepatan koordinasi internal, tanpa mengurangi kualitas pelayanan administrasi. |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kepala Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp. 707,988,000,- - Realisasi Anggaran Rp. 526,481,201,- (74,36%) - Dari total anggaran | Pemanfaatan BMD untuk menunjang kegiatan pemerintahan dikelola dengan selektif dan efisien | Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan |

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|----------|---|---------------|-----------------|
| | menunjukkan adanya hemat 25,64% yang berasal dari sisa realisasi anggaran | | |

Kesimpulan efisiensi :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 15,50%
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

SASARAN 2 : Meningkatnya Cakupan Layanan Pengelolaan Limbah Domestik

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Pengelolaan Limbah Domestik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Target Akhir Renstra 2026 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik | 98.40 | Persen | 100 | 100 | 100 | 96.38 | 96.38 | 100 |

Indikator Sasaran Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik target yang ditetapkan 100% dengan realisasi 96.38% maka ketercapaiannya 96.38 (sangat berhasil)

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik DPUPR Kota Pekalongan dengan Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman BMCK Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Target | Capaian | Kategori |
|----|---|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------------|
| 1 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik DPUPR Kota Pekalongan | Persen | 96,38 | 96,38 | - | - | Sangat Berhasil |
| 2 | Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman BMCK | Persen | - | - | 10,97 | 9,72 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Provinsi Jawa Tengah | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|

Realisasi capaian Indikator kinerja Utama Sasaran Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman BMCK Provinsi Jawa Tengah masing-masing telah memenuhi target yang telah ditetapkan atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Analisis keberhasilan capaian kinerja Indikator sasaran Pemenuhan layanan limbah domestik dan jalan lingkungan disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1. Ada program DAK intergrasi sanitasi dengan pembangunan jamban keluarga yang meningkatkan sanitasi di Kota Pekalongan;
2. Sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat tercipta Kota Pekalongan dengan kondisi Sanitasi yang aman.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi terkait jamban aman (setiap 5 tahun sekali melakukan sedot tinja)
- b. Melakukan pendataan terkait dengan jumlah sanitasi di masyarakat, baik secara individual maupun komunal.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 2,173,514,000 | 2,417,064,000 | 2,329,104,776 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota sangat krusial dalam mendukung ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama pada pilar lingkungan dan kesehatan |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-

masing kegiatan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|--|--|---|---|
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 2,417,064,000 - Realisasi 2,329,104,776 (96,36%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 3,64% yang berasal dari : Efisiensi pada belanja bangunan material dan konstruksi dan belanja jasa pelayanan umum hanya digunakan sesuai kebutuhan | Efisiensi belanja bangunan material dan konstruksi terjadi karena belanja material menyesuaikan kebutuhan di lapangan | pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan |

Kesimpulan efisiensi :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 3,64%
2. ketercapain tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama pada pilar lingkungan dan kesehatan

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

SASARAN 3 : Meningkatnya Sarpras Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik
Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Sarpras Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Target Akhir Renstra 2026 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1 | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | 62.93 | Persen | 77.88 | 91.83 | 82.98 | 93.93 | 113.20 | 87.83 |

Indikator Sasaran Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir target yang ditetapkan adalah 82.98% dengan realisasi 93.93% maka tingkat ketercapaiannya adalah 113.20 (sangat berhasil)

Dengan formulasi perhitungan Luas Kawasan Kota yang Terlindungi

Infrastruktur Pengendali Banjir / Luas Wilayah Kota * 100% 4360.31 / 4642)
x 100 = 93.93 %.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan disebabkan faktor pendukung

Faktor Keberhasilan Pemenuhan infrastruktur pengendalian banjir:

- a. Telah terbangunnya tanggul raksasa yang ada di daerah Kota Pekalongan
- b. telah terbangunnya stasiun Pompa pengendali banjir baik skala lingkungan maupun wiyah
- c. Dukungan dari semua pihak diluar pemerintah dalam rangka percepatan penanganan banjir dan rob.

Faktor Penghambat capaian kinerja:

1. Salah satu penyebab banjir rob saat ini melalui sungai dan drainase di wilayah kota Pekalongan yang merupakan kewenangan Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan.
2. Besarnya investasi pendanaan untuk penyediaan infrastruktur pengendali banjir.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob di Kota Pekalongan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi hal –hal sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah serta kabupaten pekalongan untuk secara sinergi melakukan penanganan banjir dan rob.
- b. Mengoptimalkan peran serta pihak diluar pemerintah (masyarakat dan swasta) untuk bersama-sama terlibat aktif dalam penanganan banjir dan rob.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 7,537,178,000 | 7,929,588,000 | 7,461,616,434 | Kegiatan mencakup Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehab Stasiun Pompa Banjir, Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, Normalisasi Sungai, Rehab Tanggul dan Peninggian Tanggul, Rehab/Pemeliharaan Irigasi yang menunjang keberhasilan penurunan luas genangan dan pengendalian banjir rob di Kota Pekalongan |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 7,929,588,000 - Realisasi 7,461,616,434 (94,09%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 5,09% yang berasal dari : belanja jasa konsultan, belanja makanan dan minuman rapat, honor pengadaan serta belanja bahan bakar dan pelumas yang hanya dipergunakan sesuai kebutuhan | Efisiensi SDM telah dilakukan secara maksimal dengan mengatur jadwal Tenaga Operator Pompa sehingga Operasional Pompa dapat terlaksana dengan efektif | Efisiensi Waktu yaitu dalam penggunaan aplikasi media sosial seperti whatsapp, sebagai media koordinasi dan pelaporan pelaksanaan operasional pompa dan stasiun pompa pengendali banjir |

Kesimpulan efisiensi :

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 5,09%
2. Memaksimalkan operasional pompa dengan efektif
3. Melakukan penggunaan media sosial secara menyeluruh.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 4,402,600,000 | 3,930,895,000 | 3,741,508,332 | Kegiatan ini mencakup Penataan Saluran Drainase Perkotaan, Rehab Saluran Drainase Perkotaan, Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan, dan Normalisasi Saluran yang menunjang keberhasilan penurunan luas genangan dan pengendalian banjir rob di Kota Pekalongan |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-

masing kegiatan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|---|---|--|---|
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 3,930,895,000 - Realisasi 3,741,508,332 (95,18%) - Dari total anggaran menunjukan adanya hemat 4.82% yang berasal dari : dari belanja jasa konsultan, belanja makanan dan minuman rapat, honor pengadaan serta belanja bahan bakar dan pelumas yang hanya dipergunakan sesuai kebutuhan | Efisiensi SDM telah dilakukan secara maksimal dengan mengatur jadwal regu Tenaga Kegiatan dan THL Pemeliharaan Drainase sehingga pemeliharaan drainase dapat terlaksana dengan efektif | Efisiensi Waktu yaitu dalam penggunaan aplikasi media sosial seperti whatsapp, sebagai media koordinasi dan pelaporan pelaksanaan operasional pemeliharaan drainase perkotaan |

Kesimpulan efisiensi :

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 4,82%
2. maksimal dengan mengatur jadwal regu Tenaga Kegiatan dan THL Pemeliharaan Drainase
3. Melakukan penggunaan media sosial secara menyeluruh.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

SASARAN 4 : Meningkatkan Layanan Air Bersih Perpipaan

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Layanan Air Bersih Perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Target Akhir Renstra 2026 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1 | Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | 86.059 | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Indikator Sasaran Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi 100% maka tingkat ketercapaiannya adalah 100 (sangat berhasil)

Dengan formulasi perhitungan Jumlah jiwa yang terlayani air minum perkotaan (domestik + non domestik) dibagi jumlah penduduk (316.276 / 316.276 x100% = 100%)

Tabel 3.14

Perbandingan Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Persentase Akses Air Minum Aman BMCK Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Target | Capaian | Kategori |
|----|---|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------------|
| 1 | Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk DPUPR Kota Pekalongan | Persen | 100 | 100 | - | - | Sangat Berhasil |
| 2 | Persentase Akses Air Minum Aman BMCK Provinsi Jawa Tengah | Persen | - | - | 40,43 | 40,86 | Sangat Berhasil |

Realisasi capaian Indikator kinerja Utama Sasaran Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan dengan realisasi capaian Persentase akses air minum aman BMCK Provinsi Jawa Tengah masing-masing telah memenuhi target yang telah ditetapkan atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja Indikator Meningkatkan layanan air bersih perpipaan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja :

- a. Dukungan infrastruktur dari pemerintah kota, provinsi maupun pusat
- b. Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih

Faktor Penghambat capaian kinerja :

- a. Masih kurangnya pembangunan perluasan perpipaan di Perkotaan
- b. Masih diperlukan penambahan jaringan Sambungan Rumah (SR)

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan layanan air bersih perpipaan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan. Kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi Air permukaan di Kota Pekalongan tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih karena

sudah tercemar parah. Sumur milik warga di beberapa lokasi juga telah tercemar limbah dan bakteri E. Coli sehingga tidak dapat digunakan.

Kebutuhan air bersih warga Kota Pekalongan dipenuhi dari sumber PAMSIMAS dan PDAM yang berasal dari sumber Air Bawah tanah (ABT) dan air permukaan (bekerjasama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang melalui SPAM Petanglong).

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota | 2,608,052,000 | 1,414,658,000 | 1,192,626,819 | Kegiatan ini mendukung Perubahan jenis konstruksi pemasangan pipa distribusi air minum pada pekerjaan SPAM Clumprit |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|---|---|--|---|
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 1,414,658,000 - Realisasi 1,192,626,819 (84,30%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 15,6% yang berasal dari : - Dari belanja honor narasumber dan belanja modal instalasi air bersih | Efisiensi belanja modal instalasi air bersih meningkat karena adanya perubahan perencanaan awal dengan realisasi dilapangan karena penyesuaian di lapangan (perubahan posisi penempatan pipa dan material pipa yang digunakan berubah menjadi HDPE | pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan |

Kesimpulan efisiensi :

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 15,6%
2. Efisiensi belanja modal instalasi air bersih meningkat karena adanya perubahan perencanaan awal dengan realisasi dilapangan
3. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

SASARAN 5 : Meningkatnya Pengembangan Sarana Persampahan

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Sarana Persampahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Target Akhir Renstra 2026 |
|----|---------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1 | Pengembangan Sarana Persampahan | N/A | Persen | 20 | 60 | 80 | 120 | 150 | 100 |

Indikator Sasaran Pengembangan Sarana Persampahan target yang ditetapkan adalah 80 % dengan realisasi 120 % maka tingkat ketercapaiannya adalah 150 % (sangat berhasil)

Dengan formulasi perhitungan Jumlah komponen yang ditingkatkan menjadi kondisi baik sampai dengan tahun N/target penanganan sampai dengan tahun akhir RPJMD ($120 / 80 \times 100 \% = 150 \%$)

Tabel 3.16 Perbandingan Pengembangan Sarana Persampahan DPUPR Kota Pekalongan dengan standar Nasional maupun Provinsi tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Target Nasional | Capaian | Kategori |
|----|---|--------|--------|-----------|-----------------|---------|----------|
| 1 | Pengembangan Sarana Persampahan DPUPR Kota Pekalongan | Persen | 80 | 120 | - | - | - |

Realisasi capaian Indikator kinerja Sasaran Pengembangan Sarana Persampahan DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator Sasaran tersebut tidak dapat dibandingkan karena merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Sudah terbangunnya beberapa TPS3R di sebagian wilayah Kota Pekalongan

b. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sampah.

Analisis Penghambat capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Sudah ada perencanaan namun terkendala masalah lahan
- b. Perlunya koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Optimalisasi pelayanan sarana dan prasarana persampahan perkotaan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi hal-hal sebagai berikut :

1. kedepan untuk lebih dicermati terkait masalah lahan agar kiranya apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan agar bisa teerbangun
2. Mengoptimalkan peran serta pihak pemerintah untuk bisa meningkatkan dalam pelayanan persampahan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota | 2,411,000,000 | 3,841,008,000 | 3,704,328,200 | Pembayaran sesuai volume pekerjaan yang dilaksanakan dan pengadaan mesin pengolah sampah |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|--|---|--|---|
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kotax`x | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 3,841,008,000 - Realisasi 3,704,328,200. (96,44%) - Dari total anggaran menunjukan adanya hemat 3.56% yang berasal dari : - total belanja fotocopi, belanja narasumber dan belanja modal bangunan penampung sampah | Efisiensi belanja modal bangunan penampung sampah meningkat karena pengadaan pekerjaan fisik dan pengadaan alat melalui epurchasing, sehingga kompetensi pengadaan terutama pengadaan alat cukup ketat | pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan |

Kesimpulan efisiensi :

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 3,56%
 2. Telah dilakukan pengadaan pekerjaan fisik dan pengadaan alat melalui epurchasing
 3. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

SASARAN 6 : Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Perkotaan

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Target Akhir Renstra 2026 |
|----|--|--------------|--------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1 | Persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan | 0 | Persen | 4.73 | 2.19 | 1.09 | -6,44 | - | 2.19 |

Indikator Sasaran Persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan target yang ditetapkan adalah 1.09 % dengan realisasi -6.44 %. Dengan formulasi perhitungan (Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap pada Tahun N - Panjang Jala Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1) / Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1 *100%. (118.8-126.983)/126.983 x 100%

Tabel 3.18 Perbandingan Persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan DPUPR Kota Pekalongan dengan Persentase Panjang Jalan Provinsi kondisi Permukaan Mantap BMCK Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Target | Capaian | Kategori |
|----|--|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------------|
| 1 | Persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan | Persen | 1,09 | -6.44 | - | - | Sangat Berhasil |
| 2 | Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap BMCK Provinsi Jawa Tengah | Persen | - | - | 91,29 | 91,46 | Sangat Berhasil |

Realisasi capaian Indikator kinerja Utama sasaran Persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan DPUPR Kota Pekalongan Tahun

2025 dengan Persentase Panjang Jalan Provinsi kondisi Permukaan Mantap BMCK Provinsi Jawa Tengah masing-masing mempunyai tingkat perbedaan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Tingkat kerusakan jalan lebih tinggi dari upaya perbaikan sehingga mengakibatkan penurunan kondisi jalan dari baik ke sedang dan sedang ke rusak, hal ini menyebabkan penurunan kemantapan kondisi jalan;
- b. Belum optimalnya fungsi saluran pematus jalan;
- c. Air rob (banjir air laut) menggenangi sejumlah ruas jalan, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan peninggian jalan supaya air rob tidak menggenangi jalan;
- d. Diberlakukannya pengalihan jalan nasional dan banyaknya kendaraan berat jurusan luar kota memilih melewati jalan kota, upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan peningkatan jalan terhadap jalan yang dimaksud.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan yang telah terbangun pada setiap tahun anggaran.
- b. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada wilayah tertentu untuk membuka akses infrastruktur perekonomian dan kelancaran transportasi masyarakatan perkotaan.
- c. Pengusulan perbaikan ataupun peningkatan jalan ke Pemerintah Pusat dengan IJD (Impres Jalan Daerah)

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Program Penyelenggaraan Jalan

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 18,747,730,000 | 16,542,644,000 | 15,504,227,551 | Dalam usaha pencapaian target kondisi kemantapan jalan ini, banyak tantangan yang dilalui akibat dari refocusing anggaran. |

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | | Misalnya, dalam pekerjaan peningkatan sebuah ruas jalan, yang tadinya direncanakan untuk dikerjakan juga saluran pematus jalannya. Namun karena keterbatasan anggaran, pengerjaan saluran jalan tidak jadi dilaksanakan. Sehingga dalam penanganan sebuah ruas jalan bisa dikatakan belum dilakukan secara HOLLISTIK atau MENYELURUH. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya genangan air di beberapa titik. |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Jalan

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|--|--|--|--|
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kotax`x | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 16,542,644,000 - Realisasi 15,504,227,551 (93.72%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 6.28% yang berasal dari : - Dari belanja pemeliharaan jembatan, belanja modl jalan, belanja hinor pengadaan dan belanja konsultan | Efisiensi SDM telah dilakukan secara maksimal dengan mengatur jadwal regu THL Pemeliharaan jalan sehingga pemeliharaan jalan dapat terlaksana dengan efektif | Efisiensi Waktu yaitu dalam penggunaan aplikasi media sosial seperti whatsapp, instagram OPD guna memangkas waktu pelaporan masyarakat tentang pengaduan jalan yang sebelumnya harus melalui surat fisik/telepon kantor. |

Kesimpulan efisiensi :

Program Penyelenggaraan Jalan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 6.28%
 2. Telah dilakukan secara maksimal dengan mengatur jadwal regu THL Pemeliharaan jalan sehingga pemeliharaan jalan dapat terlaksana dengan efektif
 3. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

SASARAN 7 : Terwujudnya Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Capaian indikator kinerja sasaran Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Target Akhir Renstra 2026 |
|----|--|--------------|--------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 96.179 | Persen | 99.89 | 99.45 | 99.89 | 99.89 | 100 | 99.89 |

Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target yang ditetapkan adalah 99.89 % dengan realisasi 99.89 % maka tingkat ketercapaiannya adalah 99.89% (sangat berhasil)

Dengan formulasi perhitungan Luas kawasan lindung dan budidaya yang sesuai dengan perda RTRW tahun N / Luas kawasan lindung dan budidaya sesuai perda RTRW * 100% (4616,48/4642 x100 % = 99.89%) 100% = 120%

Tabel 3.20 Perbandingan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DPUPR Kota Pekalongan DPUPR Kota Pekalongan dengan standar Nasional maupun Provinsi tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Target Provinsi | Capaian | Kategori |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------------|---------|----------|
| 1 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persen | 99.89 | 99.89 | - | - | - |

Realisasi capaian Indikator kinerja Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator Sasaran tersebut tidak dapat dibandingkan karena merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Sudah ditetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagai dasar/acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Pekalongan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut

diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi terkait tata ruang kepada masyarakat
- b. Penetapan Peraturan Walikota terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang termasuk insentif dan disinsentif.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penataan Bangunan Gedung

| Kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 1,775,544,000 | 1,875,369,000 | 1,762,681,466 | Kegiatan pada program penataan bangunan gedung yang meliputi penyelenggaraan perizinan, kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala bangunan gedung serta penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung berkontribusi langsung pada terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang dan pemanfaatan ruang |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penataan Bangunan Gedung

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|---|--|--|---|
| Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 1,875,369,000 - Realisasi 1,762,681,466 (93.99%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 6.01% yang - belanja honor narasumber yang diberikan sesuai kebutuhan | Efisiensi SDM meningkat karena pada proses pengajuan PBG bangunan kepentingan umum, sistem secara otomatis menugaskan permohonan kepada Tim Profesi Ahli (TPA) terdaftar yang mengurangi beban kerja bagi Tim Penilai Teknis (TPT) yang berasal dari dinas sehingga dapat lebih fokus dalam proses pengajuan PBG bangunan hunian dan penerbitan SLF. | Penggunaan aplikasi SIMBG yang dapat membantu pemohon dalam mengurus PBG secara mandiri tanpa datang langsung ke OPD. |

Kesimpulan efisiensi :

Program Penyelenggaraan Jalan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 6.01%
2. Penggunaan aplikasi SIMBG menjadi sangat efisien.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya

signifikan.

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

| kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 71,640,000 | 70,640,000 | 63,046,500 | Keberhasilan penyelenggaraan pelatihan tenaga konstruksi ditentukan oleh kombinasi antara perencanaan yang matang, materi yang relevan, instruktur ahli, serta metode pengajaran yang praktis, pelatihan mampu meningkatkan produktivitas, menjamin keselamatan kerja, dan memastikan kualitas hasil bangunan sesuai standar |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | 37,000,000 | 41,660,000 | 32,815,000 | Keberhasilannya adalah kepatuhan terhadap regulasi, system yang terintegrasi, dan komitmen SDM untuk meningkatkan transparansi serta kualitas konstruksi daerah. |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|---|---|--|--|
| Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 70,640,000 - Realisasi Rp 63,046,500 (89,25%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 10,75% yang berasal dari : - Dari total belanja honor narasumber yang diberikan sesuai kebutuhan. | Pelatihan tukang untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan proyek | Dengan tenaga kerja yang mendapatkan materi pelatihan diharapkan mampu menyelesaikan proyek secara tepat waktu |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 1,875,369,000 - Realisasi 1,762,681,466 (93,99%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 6% yang berasal dari : - Dari sisa realisasi anggaran | Membantu SDM bekerja lebih cepat dan akurat dalam menghitung RAB | Penggunaan standar harga memangkas durasi survei pasar yang berulang dan mempercepat penyusunan RAB |

Kesimpulan efisiensi :

Program Pengembangan Jasa Konstruksi berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 6%
2. Penghitungan RAB lebih cepat
3. Standar harga dapat memangkas survei pasar

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

| kegiatan | Pagu Penetapan (Rp.) | Pagu Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Alasan Mengapa Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah Kabupaten/Kota | 98,550,000 | 98,550,000 | 98,550,000 | Kegiatan ini mendukung tentang Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan. |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 184,604,000 | 178,604,000 | 177,466,590 | Kegiatan ini mendukung tentang Laporan Forum Penataan Ruang semester I dan II. |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 32,815,000 | 32,815,000 | 15,320,000 | Kegiatan ini mendukung tentang Laporan Forum Penataan Ruang semester I dan II. |

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

| Kegiatan | Efisiensi Anggaran | Efisiensi SDM | Efisiensi Waktu |
|--|---|---|---|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 98,550,000 - Realisasi Rp 98,550,000 (100%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0% yang berasal dari : - Dari sisa realisasi anggaran | RDTR Kota Pekalongan sudah terintegrasi dengan OSS, Sehingga tidak ada lagi Rapat pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk pengajuan Persetujuan KKPR, semua sudah terbit otomatis melalui OSS, sehingga mengurangi beban kerja bagi FPR | Penggunaan aplikasi Simantan dapat memberikan informasi tentang tata ruang secara mandiri dan detail sehingga tidak harus ke OPD untuk meminta informasi seputar penataan ruang |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 178,604,000 - Realisasi 177,466,590 (99,36%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,64% yang berasal dari : - Dari sisa realisasi anggaran | RDTR Kota Pekalongan sudah terintegrasi dengan OSS, Sehingga tidak ada lagi Rapat pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk pengajuan Persetujuan KKPR, semua sudah terbit otomatis melalui OSS, sehingga mengurangi beban kerja bagi FPR | Penggunaan aplikasi Simantan dapat memberikan informasi tentang tata ruang secara mandiri dan detail sehingga tidak harus ke OPD untuk meminta informasi seputar penataan ruang |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 32,815,000 - Realisasi 15,320,000 (96,66%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 3,34% yang berasal dari : - Dari sisa realisasi anggaran | RDTR Kota Pekalongan sudah terintegrasi dengan OSS, Sehingga tidak ada lagi Rapat pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk pengajuan Persetujuan KKPR, semua sudah terbit otomatis melalui OSS, sehingga mengurangi beban kerja bagi FPR | Penggunaan aplikasi Simantan dapat memberikan informasi tentang tata ruang secara mandiri dan detail sehingga tidak harus ke OPD untuk meminta informasi seputar penataan ruang |

Kesimpulan efisiensi :

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 0.57%
2. RDTR Kota Pekalongan sudah terintegrasi dengan OSS, Sehingga tidak ada lagi Rapat pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk pengajuan Persetujuan KKPR
3. Penggunaan aplikasi Simantan dapat memberikan informasi tentang tata ruang secara mandiri dan detail

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp52.663.922.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp Rp 48.254.711.496,- atau sebesar 91.63%. dan silpa sebesar Rp 4.409.210.505,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | PENCAPAIAN % | |
|----|--|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 52,663,922,000 | 48,254,711,496 | 91.63 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | PENCAPAIAN % | |
|----|--|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 13,447,802,000 | 11,363,610,165 | 84.50 |
| | 1 | Pereencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19,035,000 | 18,843,000 | 98.99 |
| | - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5,220,000 | 5,134,000 | 98.35 |
| | - | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD | 2,400,000 | 2,294,000 | 95.58 |
| | - | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11,415,000 | 11,415,000 | 100.00 |
| | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6,688,891,000 | 6,075,314,745 | #REF! |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6,599,261,000 | 5,993,964,745 | 90.83 |
| | - | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87,350,000 | 79,070,000 | 90.52 |
| | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2,280,000 | 2,280,000 | 100.00 |
| | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 23,610,000 | 23,360,570 | 98.94 |
| | - | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 23,610,000 | 23,360,570 | 98.94 |
| | 4 | Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 13,410,000 | 12,662,000 | 94.42 |
| | - | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0.00 |
| | - | Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan | 13,410,000 | 12,662,000 | 94.42 |
| | 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 531,765,000 | 519,731,829 | 97.74 |
| | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,000,000 | 4,894,500 | 97.89 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | PENCAPAIAN % | |
|----|---|---|-------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 282,604,000 | 272,159,760 | 96.30 |
| | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 118,136,000 | 117,496,800 | 99.46 |
| | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21,900,000 | 21,843,400 | 99.74 |
| | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2,190,000 | 2,149,500 | 98.15 |
| | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 94,935,000 | 94,314,869 | 99.35 |
| | - | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 7,000,000 | 6,873,000 | 98.19 |
| | 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 758,900,000 | 711,771,180 | 93.79 |
| | - | Pengadaan Alat Besar | 758,900,000 | 711,771,180 | 93.79 |
| | 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4,704,203,000 | 3,475,445,640 | 73.88 |
| | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2,190,000 | 1,870,000 | 85.39 |
| | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4,298,146,000 | 3,074,813,230 | 71.54 |
| | - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 403,867,000 | 398,762,410 | 98.74 |
| | 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah | 707,988,000 | 526,481,201 | 74.36 |
| | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 550,498,000 | 369,320,323 | 67.09 |
| | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 43,670,000 | 43,665,628 | 99.99 |
| | - | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 77,320,000 | 77,160,500 | 99.79 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | PENCAPAIAN % | |
|----------|---|--|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | - | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 36,500,000 | 36,334,750 | 99.55 |
| B | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 8,789,178,000 | 8,269,426,097 | 94.09 |
| | 1 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 7,929,588,000 | 7,461,616,434 | 94.10 |
| | - | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir | 1,141,228,000 | 1,063,919,400 | 93.23 |
| | - | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | 3,663,860,000 | 3,430,035,959 | 93.62 |
| | - | Normalisasi/ Restorasi Sungai | 200,000,000 | 165,312,000 | 82.66 |
| | - | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 365,000,000 | 350,614,750 | 96.06 |
| | - | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 2,340,500,000 | 2,252,149,825 | 96.23 |
| | - | Rehabilitasi Polder/ Kolam Retensi | 219,000,000 | 199,584,500 | 91.13 |
| | 2 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 859,590,000 | 807,809,663 | 93.98 |
| | - | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 859,590,000 | 807,809,663 | 93.98 |
| C | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1,414,658,000 | 1,192,626,819 | 84.30 |
| | 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota | 1,414,658,000 | 1,192,626,819 | 84.30 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | PENCAPAIAN % | |
|----------|---|---|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | - | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 260,273,000 | 209,376,569 | 80.44 |
| | - | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1,154,385,000 | 983,250,250 | 85.18 |
| D | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 3,841,008,000 | 3,704,328,200 | 96.44 |
| | 1 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota | 3,841,008,000 | 3,704,328,200 | 96.44 |
| | - | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 3,841,008,000 | 3,704,328,200 | 96.44 |
| E | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 2,417,064,000 | 2,329,104,776 | 96.36 |
| | 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 2,417,064,000 | 2,329,104,776 | 96.36 |
| | - | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 80,406,000 | 72,665,234 | 90.37 |
| | - | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 0 | 3,680,000 | 0.00 |
| | - | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 2,243,558,000 | 2,165,456,141 | 96.52 |
| | - | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 93,100,000 | 87,303,401 | 93.77 |
| F | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 3,930,895,000 | 3,741,508,332 | 95.18 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | PENCAPAIAN % | |
|----------|---|--|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 3,930,895,000 | 3,741,508,332 | 95.18 |
| | - | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 3,557,355,000 | 3,399,655,079 | 95.57 |
| | - | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | 373,540,000 | 341,853,253 | 91.52 |
| G | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 1,875,369,000 | 1,762,681,466 | 93.99 |
| | 1 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 1,875,369,000 | 1,762,681,466 | 93.99 |
| | - | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1,681,469,000 | 1,590,859,266 | 94.61 |
| | - | Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 84,400,000 | 81,630,500 | 96.72 |
| | - | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 109,500,000 | 90,191,700 | 82.37 |
| H | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 16,542,644,000 | 15,504,227,551 | 93.72 |
| | 1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 16,542,644,000 | 15,504,227,551 | 93.72 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | PENCAPAIAN % | |
|----------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | - | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 98,000,000 | 96,501,400 | 98.47 |
| | - | Rekonstruksi Jalan | 10,817,444,000 | 10,383,203,400 | 95.99 |
| | - | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 248,380,000 | 155,597,484 | 62.64 |
| | - | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 123,740,000 | 121,287,500 | 98.02 |
| | - | Rehabilitasi Jalan | 1,128,454,000 | 1,101,388,100 | 97.60 |
| | - | Pemeliharaan Rutin Jalan | 4,126,626,000 | 3,646,249,667 | 88.36 |
| I | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 112,300,000 | 95,861,500 | 85.36 |
| | 1 | PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI | 70,640,000 | 63,046,500 | 89.25 |
| | - | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | 18,240,000 | 13,283,000 | 72.82 |
| | - | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 52,400,000 | 49,763,500 | 94.97 |
| | 2 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | 41,660,000 | 32,815,000 | 78.77 |
| | - | Penyediaan Data dan Informasi JasaKonstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | 41,660,000 | 32,815,000 | 78.77 |
| J | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 293,004,000 | 291,336,590 | 99.43 |
| | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah Kabupaten/Kota | 98,550,000 | 98,550,000 | 100.00 |
| | - | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 98,550,000 | 98,550,000 | 100.00 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | PENCAPAIAN % | |
|----|---|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 178,604,000 | 177,466,590 | 99.36 |
| | - | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 178,604,000 | 177,466,590 | 99.36 |
| | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 15,850,000 | 15,320,000 | 96.66 |
| | - | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 15,850,000 | 15,320,000 | 96.66 |
| | JUMLAH TOTAL | | 52,663,922,000 | 48,254,711,496 | 91.63 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja DPUPR Kota Pekalongan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, pada Tahun 2025 telah menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Indeks nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 84.55.
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP DPUPR 83.05 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 98.23%.
2. Indikator Sasaran Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi 96.38% maka tingkat ketercapaiannya adalah 96.38%
3. Indikator Sasaran Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir target yang ditetapkan adalah 82.98% dengan realisasi 93.93% maka tingkat ketercapaiannya adalah 113.20%
4. Indikator Sasaran Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi 100% maka tingkat ketercapaiannya adalah 100%
5. Indikator Sasaran Pengembangan Sarana Persampahan target yang

ditetapkan adalah 80% dengan realisasi 120% maka tingkat ketercapaiannya adalah 150%

6. Indikator Sasaran Persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan target yang ditetapkan adalah 1.09 % dengan realisasi -6.44%.
7. Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target yang ditetapkan adalah 99.89% dengan realisasi 99.89% maka tingkat ketercapaiannya adalah 100%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada DPUPR Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 52.663.922.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp Rp 48.254.711.496,- atau sebesar 91.63%. dan silpa sebesar Rp 4.409.210.505.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DPUPR Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja DPUPR Kota Pekalongan serta langkah kedepan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reuiu atas capaian kinerja yang belum memenuhi target.
2. Meningkatkan koordinasi dengan bidang terkair.
3. Melakukan sosialisasi terkait jamban aman (setiap 5 tahun sekali melakukan sedot tinja)
4. Melakukan pendataan terkait dengan jumlah sanitasi di masyarakat, baik secara individual maupun komunal
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah serta kabupaten pekalongan untuk secara sinergi melakukan penanganan banjir dan rob.
6. Mengoptimalkan peran serta pihak diluar pemerintah (masyarakat dan swasta) untuk bersama-sama terlibat aktif dalam penanganan banjir dan rob.

7. Untuk lebih dicermati terkait masalah lahan agar kiranya apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan agar bisa terbangun
8. Mengoptimalkan peran serta pihak pemerintah untuk bisa meningkatkan dalam pelayanan persampahan.
9. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan yang telah terbangun pada setiap tahun anggaran.
10. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada wilayah tertentu untuk membuka akses infrastruktur perekonomian dan kelancaran transportasi masyarakatan perkotaan.
11. Melakukan sosialisasi terkait tata ruang kepada masyarakat
12. Penetapan Peraturan Walikota terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang termasuk insentif dan disinsentif.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja DPUPR yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja dimasa yang akan datang lebih baik lagi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 24 Februari 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKALONGAN



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN**

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KETERANGAN | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Meningkatkan kualitas layanan publik | | Indeks kepuasan masyarakat | Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi | Indeks | 77.62 | 77.87 | 78.12 | 78.37 | 78.62 | 78.87 | DPUPR |
| 2 | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip OPD | Nilai SAKIP Tahun N Sumber data : Inspektorat | Indeks | 82.50 | 83.50 | 84.50 | 84.45 | 84.55 | 84.65 | DPUPR |
| 3 | Pemenuhan layanan limbah domestik | | Persentase layanan pengelolaan air limbah domestik | Formulasi : (Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik + persentase jalan / jembatan lingkungan) / 2 * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | N/A | 90.76 | 90.97 | 91.18 | 91.40 | 91.61 | DPUPR |
| 4 | | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | Formulasi : Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / jumlah rumah kab/kota * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | 98.40 | 98.60 | 98.80 | 100 | 100 | 100 | DPUPR |
| 5 | Penanganan banjir dan rob | | Luas genangan banjir dan rob | Formulasi Luas genangan banjir dan rob tahun N Tipe capaian : Semakin Rendah Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Hektar | 1537 | 1230 | 1027 | 909 | 790 | 565 | DPUPR |
| 6 | | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase luas Kawasan kota rawan banjir dan rob yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir | Formulasi : Luas genangan banjir dan rob Tipe capaian : Semakin Rendah Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | 66.89 | 73.5 | 77.88 | 80.42 | 82.98 | 87.83 | DPUPR |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 7 | Meningkatkan layanan air minum | | Persentase penduduk yang mendapatkan akses layanan air minum | Formulasi : Jumlah jiwa yang memperoleh akses air minum baik dari pemerintah ataupun mandiri dibagi jumlah penduduk * 100 % Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPUPR |
| 8 | | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | Formulasi : Jumlah jiwa yang memperoleh akses air minum baik dari pemerintah ataupun mandiri dibagi jumlah penduduk * 100 % Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | 85,766 | 87,092 | 88,389 | 100 | 100 | 100 | DPUPR |
| 9 | Optimalisasi pelayanan sarana dan prasarana persampahan perkotaan | | Persentase prasarana persampahan dalam kondisi baik | Formulasi : Jumlah penambahan komponen prasarana persampahan kondisi baik / jumlah total komponen prasarana persampahan Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | | 33.33 | 40.28 | 47.22 | 54.17 | 61.11 | 68.06 | DPUPR |
| 10 | | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan sarana persampahan | Formulasi : Jumlah penambahan komponen prasarana persampahan kondisi baik Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | N/A | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | DPUPR |
| 11 | Meningkatkan layanan transportasi perkotaan | | Persentase keterhubungan jalan | Formulasi : (Total panjang jalan sekota - Total panjang jalan yang belum terbangun) / Total panjang jalan sesuai SK Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 96.19 | 96.73 | 97.29 | DPUPR |
| 12 | | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | persentase peningkatan kemandapan jalan dan jembatan perkotaan | Formulasi : Total panjang jalan sekota dibandingkan dengan total panjang jalan yang belum terbangun Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 2.19 | 1,09 | 1,09 | DPUPR |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13 | Mewujudkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | | Jumlah regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Formulasi : Jumlah regulasi perda dan atau perwal bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang masih berlaku sampai tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Regulasi | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | DPUPR |
| 14 | | Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Formulasi : Akumulasi dengan Tahun sebelumnya Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR | Persen | 96.19 | 96.20 | 96.21 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | DPUPR |

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAMBANG SUGIARTO, ST, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang



BAMBANG SUGIARTO, ST, MM
NIP. 19710304 199903 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

| NO. | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KETERANGAN |
|-----------------|---|--|---------------|--|
| Tujuan : | | | | |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | Indeks kepuasan masyarakat | 78.62 Indeks | Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi |
| 2. | Pemenuhan Layanan Limbah Domestik | Persentase layanan pengolahan air limbah domestik | 91.40 Persen | Formulasi : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 3. | Penanganan banjir dan rob | Luas Genangan Banjir dan Rob | 790.00 hektar | Formulasi : Luas genangan banjir dan rob Tipe capaian : Semakin Rendah Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 4. | Meningkatkan layanan air minum | Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum | 100.00 Persen | Formulasi : Jumlah jiwa yang memperoleh akses air minum baik dari pemerintah ataupun mandiri dibagi jumlah penduduk * 100 % Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 5. | Optimalisasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Persampahan Perkotaan | Persentase prasarana persampahan dalam kondisi baik | 61.11 Persen | Formulasi : Jumlah penambahan komponen |

| NO. | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KETERANGAN |
|------------------|---|---|---------------|--|
| | | | | prasarana persampahan kondisi baik Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 6. | Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan | Persentase keterhubungan jalan | 96.73 Persen | Formulasi : Total panjang jalan sekota dibandingkan dengan total panjang jalan yang belum terbangun Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 7. | Mewujudkan Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang | Jumlah regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang | 7.00 Regulasi | Formulasi : Akumulasi dengan Tahun sebelumnya Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| Sasaran : | | | | |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP OPD | 84.55 Indeks | Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat |
| 2. | Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) | 100 Persen | Formulasi : (Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / |

| NO. | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KETERANGAN |
|-----|---|---|--------------|---|
| | | | | jumlah rumah kab/kota * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 3. | Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik | Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | 82.98 Persen | Formulasi : Luas Kawasan Kota yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir / Luas Wilayah Kota * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 4. | Meningkatnya layanan air bersih perpipaan | Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk | 100 Persen | Formulasi : Jumlah jiwa yang terlayani air minum perkotaan (domestik + non domestik) dibagi jumlah penduduk Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 5. | Meningkatnya pengembangan sarana persampahan | Pengembangan Sarana Persampahan | 80.00 Persen | Formulasi : Jumlah komponen yang ditingkatkan menjadi kondisi baik sampai dengan tahun N/target penanganan sampai dengan tahun akhir RPJMD Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPUPR |
| 6. | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan | Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan | 1.09 Persen | Formulasi : (Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap pada |

| NO. | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KETERANGAN |
|-----|---|---|--------------|--|
| | | | | <p>Tahun N - Panjang Jala Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1) / Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1 *100%</p> <p>Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik</p> <p>Sumber data : DPUPR</p> |
| 7. | <p>Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang</p> | <p>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> | 99.89 Persen | <p>Formulasi : Luas kawasan lindung dan budidaya yang sesuai dengan perda RTRW tahun N / Luas kawasan lindung dan budidaya sesuai perda RTRW * 100%</p> <p>Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik</p> <p>Sumber data : DPUPR</p> |

| Program | | Anggaran Penetapan | Anggaran Perubahan | Keterangan |
|---|----|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Rp | 13.562.969.000 | 13.452. 802.000 | APBD |
| 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rp | 8.441.918.000 | 8.633.678.000 | APBD |
| 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rp | 2.608.052.000 | 1.414.658.000 | APBD |
| 4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Rp | 2.411.000.000 | 3.841.008.000 | APBD |
| 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Rp | 2.173.514.000 | 2.417.064.000 | APBD |
| 6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Rp | 4.402.600.000 | 3.930.895.000 | APBD |
| 7. Program Penataan Bangunan Gedung | Rp | 1.775.544.000 | 1.875.369.000 | APBD |
| 8. Program Penyelenggaraan Jalan | Rp | 18.747.730.000 | 16.542.644.000 | APBD |
| 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Rp | 108.640.000 | 112.300.000 | APBD |
| 10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp | 301.404.000 | 293.004.000 | APBD |

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

